

Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju

Insan Harapan Harahap

Program Studi S1 Ilmu Politik - Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-22, Jakarta Selatan
insan.harahap@bakrie.ac.id

Submitted : 3 Januari 2019
Publish : 25 Maret 2019

Abstrak - Lee Kuan Yew merupakan Perdana Menteri Singapura pada periode 1953-1990. Dalam masa kepemimpinannya, Lee menuai pro-kontrasi gaya kepemimpinan yang otoriter sekaligus demokratis, yang kemudian disebut sebagai *mobokrasi* atau *hybrid regime* atau 'Demokrasi ala Asia' yaitu membatasi kebebasan demokrasi dengan tujuan untuk dapat memelihara tradisi komunitas di Singapura. Oleh beberapa pakar, Lee digambarkan sebagai pemimpin yang kharismatik, diktator, dan sekaligus pemimpin transformasional, karena mampu memotivasi dan membawa kemajuan besar pada semua sektor. Model kepemimpinan Lee telah menjadi alat pemelihara proses politik dan ekonomi Singapura yang berkinerja tinggi dan stabil, dalam waktu yang bersamaan. Lee berhasil merubah Singapura menjadi negara maju dan negara metropolitan ketiga di dunia dengan waktu yang relatif singkat (tiga dekade). Oleh The Heritage Foundation dalam *2013 Ten Economic Freedom*, Singapura mendapat peringkat kedua dunia dengan skor rata-rata 88.0 sebagai negara yang memiliki kepatuhan hukum, pemerintahan yang terbatas, efisiensi, dan pasar terbuka. Selain itu, Singapura berhasil memperoleh GDP US\$14.000, serta negara yang bersih dari korupsi.

Kata Kunci: kepemimpinan, demokrasi, otoriter, Lee Kuan Yew

Abstrac - Lee Kuan Yew was the Prime Minister of Singapore in the period of 1953-1990. During his leadership, Lee evoked the controversy of an authoritarian and democratic leadership style, which was known as *mobokrasi* or *hybrid regime* that limits the democratic freedom with the aim at maintaining the traditions of the community in Singapore. Some experts think that Lee is described as a charismatic, dictator and transformational leader because he is able to motivate and bring great progress to all sectors. At the same time, Lee's leadership model has become a tool for maintaining Singapore's high-performance and stable political and economic processes. Lee managed to turn Singapore into a developed country and the third metropolitan country in the world with a relatively short time (three decades). By The Heritage Foundation in the *2013 Ten Economic Freedom*, Singapore was the second rank in the world with an average score of 88.0 as a country that has legal compliance, limited governance, efficiency, and open markets. In addition, Singapore managed to obtain US \$ 14,000 GDP, as well as a country that is free from corruption.

Keywords: leadership, democracy, authoritarian, Lee Kuan Yew

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari peran orang lain. Sehingga, dalam berkehidupan masyarakat dan negara, manusia tidak bisa menampik kemungkinan bahwa peran dari orang lain sangat dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan melalui proses saling membantu satu sama lain, sehingga manusia kemudian membentuk organisasi atau negara untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Namun demikian, organisasi hanyalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang tidak teratur tanpa adanya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan

dan pemberian pengaruh pada kegiatan dari kelompok anggota yang saling berhubungan tugas. Kepemimpinan tidak akan lepas dari siapa yang memimpin yang disebut pemimpin. Pemimpin adalah paduan antara relasi dan pengaruh. Kepemimpinan muncul akibat hasil interaksi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin (Kartono, 2006). Pemimpin adalah agen perubahan, orang yang perilakunya lebih besar untuk mempengaruhi orang lain dibandingkan orang lain mempengaruhinya (Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2008). Selain mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas organisasi, peran pemimpin harus disertai dengan rancangan proses manajemen

dan struktur organisasi sehingga tercipta budaya organisasi yang kondusif, yang sangat mempengaruhi keberhasilan mencapai sasaran (Jatmiko, 2013).

Dalam keberlangsungan sebuah organisasi, peran dari pemimpin sangat dibutuhkan untuk menjadi nahkoda dalam merealisasikan visi dan misi yang ingin dicapai oleh anggota organisasinya. Dengan demikian, dapat kita ketahui bagaimana peranan dari pemimpin menjadi sosok yang sangat sentral.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemimpin adalah bagaimana seorang pemimpinan harus menjadi wajah utama dari sebuah negara. Negara yang dapat dikatakan berhasil tergantung dari bagaimana pemimpin membuat, merancang, dan mengimplementasikan sebuah kebijakan guna mencapai sesuatu yang telah diagendakan. Pemimpin harus benar-benar bijaksana dan benar-benar dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan, baik secara moral maupun secara formal (Najib, 2013).

Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi penggerakan (*actuating*) dalam manajemen. Fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya (Winardi, 2000). Fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan mengambil inisiatif dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Dengan demikian *actuating* sangat erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai seperti yang diinginkan. Winardi juga mengemukakan bahwa sekalipun terdapat banyak teori tentang fungsi-fungsi manajemen, namun dapat disederhanakan bahwa fungsi manajemen setidaknya meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Winardi, 2000).

Perencanaan yang telah ditetapkan memerlukan tindakan untuk mengerahkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam

untuk dapat direalisasikan. Rencana yang telah ditetapkan otomatis menunjukkan batas-batas pengambilan keputusan dan batas-batas pelaksanaan aktivitas. Hal tersebut dituntut untuk dapat mengantisipasi tentang kejadian-kejadian, masalah yang akan muncul, dan hubungan kausalitas antar pihak terkait dalam suatu organisasi atau negara di masa mendatang.

Mengingat bahwa di masa mendatang terdapat ketidakpastian, maka antisipasi yang telah ditetapkan pun sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemimpin harus pintar melihat segala sesuatu yang dianggap akan menjadi sebuah permasalahan atau ancaman, serta pemimpin harus cermat dalam menentukan arah kebijakan.

Sukses atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya ditentukan oleh kemampuan tingkat pemahamannya terhadap situasi dan kondisi serta perilaku para bawahannya. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, setiap pemimpin mempunyai perilaku dan cara tertentu dalam memimpin, yang mana dari perilaku tersebut dapat menunjukkan gaya kepemimpinannya, karena gaya kepemimpinan mencerminkan apa yang dilakukan pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh ketika dipergunakan oleh pimpinan di dalam kepemimpinannya (Wirawan, 2001). Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mempengaruhi perilaku orang lain (Thoha, 2008).

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom yang

menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan (Davis & Newstrom, 1996).

Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, Blanchard, & Johnson, 1996).

Menurut Kartono (Kartono, 2006) dan Nawawi (Nawawi, 2005), gaya kepemimpinan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Otoriter (authoritarian), yaitu pemimpin yang memusatkan semua keputusan organisasi pada dirinya sendiri. Dia adalah penentu, penguasa, dan pengendali organisasi. Para bawahan hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin.
2. Demokratis (democratic), yaitu pemimpin yang memberikan keleluasaan kepada bawahan untuk ikut berkontribusi dalam pembuatan keputusan organisasi. Dia mengutamakan orientasi hubungan dengan para bawahan. Para bawahan diberikan informasi tentang tugas dan tanggungjawabnya. Setiap bawahan dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan.
3. Bebas (*laissezfaire*), yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan untuk membuat dan melaksanakan keputusan. Semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya, sehingga dengan demikian dianggap cukup dapat memberikan

kesempatan pada para bawahannya bekerja bebas tanpa kekangan.

Namun, ada juga beberapa gaya kepemimpinan yang cenderung didefinisikan sebagai karakter dari sebuah pemimpin adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan terakhir yang hangat dibicarakan selama dua dekade terakhir ini. Kepemimpinan transformasional termasuk dalam teori kepemimpinan modern yang gagasan awalnya dikembangkan oleh James McGroger dan Burns, yang secara eksplisit mengangkat suatu teori bahwa kepemimpinan transformasional adalah sebuah proses dimana pimpinan dan para bawahannya berusaha mencapai tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi (Burn, 1998).

Selanjutnya menurut Burns, bahwa kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin Transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui pemimpinnya (Burn, 1998).

Namun demikian, umumnya gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu orientasi proses, orientasi hubungan, dan orientasi hasil. Sedangkan gaya kepemimpinan yang sering dijumpai dalam organisasi, termasuk organisasi yang lebih luas seperti negara adalah kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan situasional.

Penulis melihat bahwa isu kepemimpinan menarik untuk diteliti, khususnya ciri atau gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam menjalankan pemerintahannya dalam tekanan dan tuduhan yang dihadapainya, sehingga sukses membawa Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Pertumbuhan ekonomi adalah

salah satu indikator sebuah negara untuk dikatakan sebagai negara maju atau negara berkembang. Negara maju merupakan sebutan bagi negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP (Gross Domestic Bruto) per kapita tinggi dianggap negara maju. Negara maju mempunyai ciri-ciri pendapatan perkapita tinggi, angka kematian dan angka kelahiran rendah, dan angka indeks pembangunan manusia yang tinggi (Utami & Kurniawati, 2018). Artinya negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan yang tinggi.

Biasanya negara yang memiliki Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita tinggi dianggap sebagai negara maju. Ciri negara maju adalah angka pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, tingkat kematian bayi pun sangat rendah karena mereka memiliki kemajuan dalam bidang kedokteran, usia harapan hidup yang tinggi, serta rendahnya angka ketergantungan lansia terhadap anaknya (Ciputrauceo.net, 2016). Pengelompokan negara maju oleh Ciputrauceo.net, memasukkan Singapura, Jepang, Hongkong, sebagai negara maju di kawasan Asia.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis gaya kepemimpinan dan hasil kepemimpinan Lee Kuan Yew saat memimpin Singapura pada periode 1959-1990. Presiden Lee Kuan Yew menuai berbagai pro dan kontra dalam masa kepemimpinannya. Dengan melihat realita pada saat ini, banyak yang melontarkan konotasi baik atau buruk. Namun, pada intinya bahwa Lee Kuan Yew memiliki legitimasi untuk memimpin dan mengimplementasikan setiap kebijakannya untuk memperbaharui wajah Singapura pada periode tersebut.

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan bagaimana Lee Kuan Yew memimpin Singapura dalam tiga dekade, dan bagaimana gaya kepemimpinannya memberikan dampak terhadap kehidupan

masyarakat Singapura. Pembahasan mengenai kepemimpinan Lee Kuan Yew, akan ditulis secara deskriptif dengan melihat bagaimana gaya kepemimpinan pada masa berkuasa sebagai Perdana Menteri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis menekankan analisis atas gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam membawa Singapura sebagai salah satu negara maju di Asia hanya dalam kurun waktu tiga dekade.

Data penelitian ini bersumber dari bahan pustaka berupa buku, karya ilmiah, dan berita-berita dari website terpercaya yang menggambarkan gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew sebelum dan selama menjadi Perdana Menteri Singapura. Setelah itu, penulis juga akan memaparkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Singapura Singapura selama kepemimpinan Lee Kuan Yew.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal kebangkitan Lee Kuan Yew sehingga menjadi pemimpin Singapura dimulai dengan mendirikan partai bersama kolega-koleganya, yaitu People's Action Party (PAP). Di partainya sendiri, Lee Kuan Yew berhasil menduduki jabatan strategis yaitu posisi Sekretaris Jenderal. PAP mengikuti pemilihan legislatif pertamanya pada tahun 1955, namun karena Singapura masih menjadi negara koloni Inggris pada saat itu, PAP hanya menjadi partai minoritas, sementara yang menjadi partai mayoritas adalah Party Labour. Dikarenakan masih menjadi koloni Inggris, jabatan perdana menteri tidak ada pada saat itu.

Seiring waktu berjalan, Lee Kuan Yew menjadi salah satu delegasi Singapura yang membantu menegosiasikan agar Singapura menjadi negara yang *self-governing* di dalam sistem negara persemakmuran pada saat itu. Akhirnya, Singapura mendapatkan haknya dan pada tahun 1959, Singapura mengadakan pemilihan di bawah undang-undang dan

konstitusional yang baru, dan PAP menjadi partai pemenang dengan suara mayoritas, yang sekaligus mengantarkan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri Singapura yang pertama pada tanggal 5 Juni 1959 dan selanjutnya Lee membentuk kabinet pertamanya (Britannica Editors, 2018).

Oleh Bell (dalam Natalia), menyatakan bahwa Lee Kuan Yew menjadi penguasa Singapura yang memegang kekuasaan sampai tahun 1990. Lee membuat batasan-batasan dalam kebebasan demokrasi yang bertujuan untuk memelihara tradisi komunitas di Singapura. Lee beranggapan bahwa tradisi bercorak Asia sulit dilepaskan untuk tiap komunitas, karena pergantian identitas tersebut butuh evolusi yang panjang. Lee menilai, apabila Singapura menerapkan demokrasi ala Barat, akan menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya kriminalitas, meningkatnya *single parent* dengan anak yang nakal, meningkatnya penggunaan obat terlarang, yang pada akhirnya akan menimbulkan kemiskinan, sehingga menyia-nyaikan semua yang sudah dikerjakan. Lebih lanjut, Lee menyatakan bahwa Singapura akan lebih mengutamakan kepentingan komunitas dibanding demokrasi untuk memelihara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil (Natalia, 2014).

Selanjutnya, untuk memelihara politik internal yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang stabil secara simultan, Lee menerapkan kepemimpinan semi otoriter. Setiap warga negara yang patuh pada hukum, bekerja dengan tekun, dan bersifat ofensif terhadap pemerintah, tidak perlu takut terhadap pemerintah. Namun bagi mereka yang mengkritisi dan menantang pemerintah, akan mendapat masalah (Bell, 1997).

Keunikan Singapura dapat terlihat dari pembauran kebijakan politik dan kebijakan ekonomi, sehingga menurut Lingle, rezim Singapura sebagai rezim otoriter-kapitalis. Rezim Singapura menciptakan sistem keamanan nasional dengan suatu rasa takut

yang abstrak dengan penyebab yang tidak jelas, serta hukuman yang dapat diberikan oleh pemerintah (Lingle, 1998).

Lebih lanjut, Lingle menjelaskan bahwa kombinasi seperti ini telah menjadi kunci dari pelaksanaan *mobokrasi*, atau dengan bahasa lain “demokrasi ala Asia”. Rezim PAP yang sedang berkuasa menerapkan sistem “mengatur dengan rasa takut,” mengkombinasikan demokrasi ala Barat dengan nilai-nilai tradisi bercorak Asia. Ini adalah penanda bahwa sistem pemerintahan Singapura termasuk dalam klasifikasi “*hybrid*” (Lingle, 1998).

Dasar-dasar Asian Values di atas lebih mengarahkan sebuah pemerintahan kepada bentuk yang lebih otoriter dibandingkan demokrasi liberal. Oleh karena itu, Singapura saat masa pemerintahan Lee Kuan Yew yang menerapkan nilai-nilai lokal Asia dalam kepemimpinannya dinilai menganut sistem otoritarianisme.

Otoritarianisme Lee Kuan Yew di Singapura dapat dilihat dari beberapa hal lainnya selain penerapan Asian Values yang dijadikan pembenaran bagi berlangsungnya rezim otoriter tersebut. Hal yang pertama dan paling terlihat adalah mekanisme penciptaan sistem partai dominan di Singapura yang bahkan dikatakan sebagai *state party*. PAP sebagai partai yang dibentuk oleh Lee Kuan Yew merupakan partai yang menduduki kursi pemerintahan Singapura. Hal ini diperoleh melalui jalur manipulasi hukum, inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pembatasan wacana publik serta membangun hambatan bagi partai oposisi. Sebagai partai yang sedang berkuasa, dalam sistem parlementer PAP memiliki keuntungan mempengaruhi sistem pemilihan umum dan memilih waktu pelaksanaan pemilihan (Mauzy, 2006).

Dengan menerapkan sistem otoritarian ala Asian Value, pemerintahan Lee mampu membawa Singapura menempati peringkat kedua dunia di dalam index Sepuluh Kebebasan Ekonomi (Ten Economic Freedoms) oleh The Heritage Foundation dengan skor rata-rata

sebesar 88.0. Kebebasan Ekonomi tersebut terbagi dalam empat kelompok utama, yaitu aturan hukum, pemerintahan yang terbatas, efisiensi peraturan, dan pasar terbuka (Miller, Holmes, & Feulner, 2013).

Lee Kuan Yew merupakan pemimpin yang dapat dikatakan berhasil membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Beliau meninggalkan kursi perdana menteri dengan catatan GDP Singapura sebesar US\$14,000. Semua itu diraih dengan penerapan disiplin politik yang tinggi pada pemerintah Singapura seperti membudayakan pemerintahan tanpa korupsi. Selain itu, Lee juga merupakan pemimpin yang mendukung dan menerapkan pemikiran Machiavelli untuk menjadi pemimpin yang ditakuti. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya, yaitu (McCarthy, 2006):

“Between being loved and being feared, I have always believed Machiavelli was right. If nobody is afraid of me, I’m meaningless. When I say something, to make it easier for me to govern, I have to be taken very seriously. So when I say “please don’t do that”, you do it, I have to punish you because I was not joking when I said that. And when I punish, it’s to punish publicly. And people will know the next time, if you want to do that when he said “no, don’t do it”, you must be prepared for a brutal encounter. . . . What the crowd thinks of me from time to time, I consider totally irrelevant . . .”

Meskipun dengan *hybrid regime* yang telah digunakan Lee Kuan Yew untuk memimpin Singapura, namun dalam kenyataannya beliau berhasil dalam memajukan perekonomian Singapura. Melihat realitanya saat ini, Singapura menjadi salah satu dari negara yang ada di Asia yang memiliki kemampuan sangat baik dalam perkembangan ekonomi. Hal ini kemudian, tidak bisa dilepaskan dari sosok Lee Kuan Yew yang begitu cerdas dalam membuat keputusan dan

membangun perekonomian dan segala sektor yang ada di Singapura.

Negara Singapura adalah salah satu Negara yang sukses di dunia melalui gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew yang akhirnya merubah Singapura menjadi Negara metropolitan ketiga di dunia yang berkembang hanya dalam tiga dekade. Meskipun begitu tetapi banyak kritikus yang menggambarkan gaya kepemimpinannya sebagai otokratis dan diktator. Lee Kuan Yew merupakan seorang pemimpin yang karismatik dan juga transformasional karena ia adalah pemimpin yang sangat baik hampir di semua bidang. Dubrin menyatakan bahwa sebagian besar pemimpin karismatik mampu menginspirasi dan memotivasi orang tetapi biasanya tidak mampu membawa perubahan besar seperti pemimpin transformasional (DuBrin, Dalglish, & Miller, 2006). Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Lee Kuan Yew telah mengubah Singapura secara drastis dengan tujuannya yang sangat tinggi untuk bisa melaksanakan visinya untuk membuat Singapura menjadi Negara yang lebih baik.

Dalam sebuah buku Lee Kuan Yew yaitu *Hard Truths to Keep Singapore Going* disimpulkan bahawa ia memiliki tiga keutamaan disepanjang pemerintahannya yaitu adanya keselamatan nasional, ekonomi, dan isu-isu sosial (Ibrahim, 2011). Sebagai seorang Perdana Menteri, Lee Kuan Yew dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang karismatik, dimana ia terkenal dengan keterusterangannya, dan ia tidak pernah takut untuk berterus terang tentang apa yang ia lihat sebagai suatu kebenaran. Adanya kemampuan yang jujur itu adalah salah satu kunci bagi seorang pemimpin. Karena hal terbaik yang bisa dilakukan untuk tim yaitu dengan mengakui dan mengatakan yang sebenarnya. Walaupun beberapa anggota mungkin akan tersinggung atau merasa tidak nyaman, akan tetapi hal tersebut akan membuat seorang pemimpin mendapat rasa hormatnya dan orang lain akan mempercayai tipe pemimpin yang seperti ini.

Dalam pemerintahan, perbedaan sistem yang telah dianut oleh Lee Kuan Yew begitu cerdas untuk memfilter segala bentuk intervensi ideologi Barat. Beliau telah berhasil untuk membuat dan menerapkan ideologi dan sistem pemerintahan tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi yang pada saat itu dialami dan dihadapi oleh Singapura.

KESIMPULAN

Melihat gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew di Singapura, dapat dipahami bahwa menjadi seorang pemimpin yang otoriter, tidak serta-merta dilambangkan dengan kekerasan dan penyempitan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pemikiran dan gagasan yang mereka miliki. Lee Kuan Yew pada masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri Singapura, telah menggabungkan gaya kepemimpinan otoritarian dan demokratis yang kemudian dapat disebut sebagai *mobokrasi* atau *hybrid regym*, atau ‘*demokrasi ala Asia*.’ Model kepemimpinan Lee menjadi alat pemelihara proses politik dan ekonomi Singapura yang berkinerja tinggi dan stabil, dalam waktu yang bersamaan. Gaya ini terbukti mampu membawa Singapura menuju negara yang maju dalam waktu yang relatif singkat (tiga dekade). Lee Kuan Yew berkaca dari demokrasi ala Barat telah menimbulkan berbagai masalah yang tidak terselesaikan, seperti kriminalitas yang tinggi dan obat-obat terlarang.

Beberapa peneliti kepemimpinan menggambarkan bahwa gaya kepemimpinannya Lee Kuan Yew sebagai pemimpin otoriter dan diktator, namun Lee juga merupakan seorang pemimpin yang karismatik dan juga transformasional karena mampu memotivasi rakyat Singapura dan membuat kemajuan besar di semua sektor. Lee Kuan Yew telah mengubah Singapura secara drastis dengan melaksanakan visinya untuk membuat Singapura menjadi Negara yang lebih baik. Sebagai contoh, Singapura mendapat peringkat kedua dunia dengan skor rata-rata 88.0 sebagai negara yang memiliki kepatuhan hukum,

pemerintahan yang terbatas, efisiensi, dan pasar terbuka dalam *2013 Ten Economic Freedom*. Selain itu, Singapura berhasil memperoleh GDP US\$14.000, serta negara yang bersih dari korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Bell, D. A. (1997). A Communitarian Critique of Authoritarianism: The Case of Singapore. *Political Theory*, 25(1), 6–32.
- Britannica Editors. (2018). Lee Kuan Yew: Prime Minister of Singapore. Retrieved December 8, 2018, from <https://www.britannica.com/biography/Lee-Kuan-Yew>
- Burn, R. B. (1998). *Konsep Diri: Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku (Alih Bahasa: Eddy)*. Jakarta: Arcan.
- Ciputrauceo.net. (2016). Ciri-Ciri Negara Maju dan Contoh Negara Maju. Retrieved December 5, 2018, from <http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/20/i4umi9vitxnlywbzmxytbbj5q2ue2x>
- Davis, K., & Newstrom, J. W. (1996). *Perilaku dalam Organisasi (Alih Bahasa: Agus Dharma)* (7 ct. 3). Jakarta: Erlangga.
- DuBrin, A. J., Dalgligh, C., & Miller, P. (2006). *Leadership*. Queensland: John Wiley & Sons.
- Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (1996). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources* (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Ibrahim, Z. (2011). *Lee Kuan Yew: Hard Truths to Keep Singapore Going*. Singapore: Straits Times Press.
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, M. T. (2008). *Perilaku dan Manajemen Organisasi (Alih Bahasa: Gina Gania)*. (W. Hardani & B. A. Yoso, Eds.) (1st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Jatmiko. (2013). Pemimpin dan Kepemimpinan Organisasi. *Forum Ilmiah*, 10(2), 209–219.
- Kartono, K. (2006). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Lingle, C. (1998). Singapore and Authoritarian Capitalism. *The Locke Luminary*, 1(1), Part 3.
- Mauzy, D. K. (2006). The Challenge to Democracy: Singapore's and Malaysia's Resilient Hybrid Regime. *Taiwan Journal of Democracy*, 2(2), 47–68.
- McCarthy, S. (2006). *The Political Theory of Tyranny in Singapore and Burma: Aristotle and the Rhetoric of Benevolent Despotism* (1st ed.). New York: Taylor & Francis e-library.
- Miller, T., Holmes, K. R., & Feulner, E. J. (2013). *2013 Index of Economic Freedom*. Washington: The Heritage Foundation.
- Najib, A. (2013). Konstruksi Kepemimpinan Ideal untuk Indonesia. *IN RIGHT - Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 3(1), 142–161.
- Natalia, C. (2014). Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2), 107–121.
- Nawawi, H. (2005). *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Thoha, M. (2008). *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Utami, W. S., & Kurniawati, A. (2018). *Negara Maju dan Berkembang*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Winardi. (2000). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Wirawan. (2001). *Kapita Selekta Teori Kepemimpinan* (1st ed.). Jakarta: Uhamka Press.